

# Strategi Pengembangan Keilmuan dan Kualitas Pendidikan dalam Mencapai Indikator Kinerja Umum (Perspektif Administrasi Dan Kebijakan Publik)

## *Strategies for Scientific Development and Education Quality in Achieving General Performance Indicators (Public Administration and Policy Perspectives)*

Marlon Sihombing\*

Program Doktorat Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 01 Desember 2023; Direview: 15 Desember 2023; Disetujui: 26 Februari 2024

\*Corresponding Email: [marlon@usu.ac.id](mailto:marlon@usu.ac.id)

### Abstrak

Dinamika pengetahuan, analogi dengan makanan yang bisa basi oleh Samuel Arbesman (2012), menekankan perlunya pengembangan dan pemeliharaan kontinu untuk mencegah keusangan. Thomas Jones (1966) melaporkan bahwa setengah dari pengetahuan seorang insinyur menjadi usang dalam 10 tahun. Pada tahun 2019, periode keusangan ini diperkirakan hanya 2,5 hingga 5 tahun (Agus Pranusinto, 2020). Oleh karena itu, pemeliharaan dan pengembangan pengetahuan perlu dilakukan secara dinamis, didorong oleh validitas ilmiah dan relevansi kebijakan. Dalam administrasi publik, validitas ilmiah melibatkan generalibilitas, universalitas, dan replikabilitas, sementara relevansi kebijakan menjamin kontekstualitas solusi terhadap masalah sosial yang kompleks (Moeljarto Tjokrowinoto, 2013). Sinergi antara visi dan presisi menjadi kunci; visi memperkuat validitas konsep, sementara presisi meningkatkan metodologi. Faktor seperti dinamika sosial, persaingan global, dan revolusi teknologi (Industri 4.0 dan 5.0) serta pandemi COVID-19 memaksa pengembangan pengetahuan yang adaptif. Meskipun teknologi menawarkan peluang, keterlambatan Indonesia dalam berbagai indeks global menunjukkan pentingnya kolaborasi efektif antara semua stakeholder. Pandemi menunjukkan potensi teknologi untuk efisiensi layanan publik. Memanfaatkan kesuksesan ini untuk pengembangan akademis dan perbaikan pendidikan menjadi tantangan penting bagi pembuat kebijakan dan akademisi.

**Kata Kunci:** Pengembangan pengetahuan; administrasi public; relevansi kebijakan; gangguan teknologi, pandemi covid-19.

### Abstract

*Knowledge dynamics, likened to perishable food by Samuel Arbesman (2012), underscore the need for continuous development and maintenance to prevent obsolescence. Thomas Jones (1966) reported that half of an engineer's knowledge becomes outdated within 10 years. By 2019, this obsolescence period was estimated to be only 2.5 to 5 years (Agus Pranusinto, 2020). Therefore, knowledge maintenance and development must be done dynamically, driven by scientific validity and policy relevance. In public administration, scientific validity involves generalizability, universality, and replicability, while policy relevance ensures contextual solutions to complex social issues (Moeljarto Tjokrowinoto, 2013). Synergy between vision and precision is key; vision strengthens conceptual validity, while precision enhances methodology. Factors such as social dynamics, global competition, technological revolutions (Industry 4.0 and 5.0), and the COVID-19 pandemic necessitate adaptive knowledge development. Although technology offers opportunities, Indonesia's lag in various global indices underscores the importance of effective collaboration among all stakeholders. The pandemic demonstrates technology's potential for public service efficiency. Leveraging this success for academic development and educational improvement poses a significant challenge for policymakers and academics.*

**Keywords:** Knowledge development, public administration, policy relevance, technological disruptions, covid-19 pandemic.

**How to Cite:** Sihombing, M. (2024). Strategi Pengembangan Keilmuan dan Kualitas Pendidikan dalam Mencapai Indikator Kinerja Umum (Perspektif Administrasi Dan Kebijakan Publik). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (3): 1333-1340.



## PENDAHULUAN

(Arbesman, 2012) menyatakan bahwa pengetahuan juga bisa basi seperti makanan, dengan *scientometrics* bisa dihitung secara kuantitatif keusangan ilmu pengetahuan, dan admin (Rytel & Jones, 1966) melaporkan bahwa 50% dari pengetahuan seseorang insinyur yang ada pada saat ini telah mengalami keusangan dalam waktu 10 tahun. Selanjutnya untuk tahun 2019 diperkirakan keusangan pengetahuan seseorang insinyur semakin singkat, hanya butuh waktu 2.5 sampai 5 tahun menuju keusangannya (Kesmawan et al., 2020). Oleh sebab itu, menjaga, merawat, serta mengembangkan eksistensi dari pada suatu ilmu pengetahuan harus dilakukan secara dinamis. Eksistensi ilmu pengetahuan itu sendiri, sangat ditentukan *scientific validity* serta *policy relevance dari ilmu yang bersangkutan*. Dalam studi administrasi public hal *scientific validity* menyangkut generalibilitas, universalitas, rasionalitas, replikabilitasnya. Sedang yang menyangkut "*policy relevance*" nya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan administrasi publik secara kontekstual lebih bermakna untuk menghadapi perubahan yang semakin besar dan kompleks (Tjokrowinoto, 1996). Barber juga menegaskan *science exist only when rational thought is applied to what is called empirical ends*. Oleh sebab itu perhatian terhadap visi dan presisi dalam studi administrasi publik sangatlah penting. Dalam hal visi, administrasi publik harus senantiasa meningkatkan kesahihan dari konsep dan teori-teorinya, sedangkan yang berhubungan dengan presisi adalah perbaikan metodologis yang dilakukan secara terus menerus, dan diarahkan pada kondisi objektif yang ada (Kumorotomo, n.d.). Dalam dinamikanya sudah barang tentu dua komponen antara visi dan presisi ini, akan saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Demikian ilmu administrasi public hadir dan dapat bermanfaat terutama dalam upaya melahirkan kebijakan yang relevan untuk dapat menyelesaikan masalah public yang dihadapi oleh masyarakat. Demikian sebaliknya, tanpa kesadaran untuk merawat dan mengembangkannya, maka administrasi publik akan mengalami keusangan dan tidak bermanfaat (Heri et al., 2020; Utama, 2014).

Sudah barang tentu banyak faktor yang perlu diperhatikan, dalam proses perubahan atau penyempurnaan dari satu tahapan capaian ilmu pengetahuan tertentu untuk dapat ditingkatkan secara terus menerus kelevel yang lebih baik. Hal ini memang sejalan dengan hakekat manusia sebagai *homo sapiens*, makhluk yang *inquisitive*, yang selalu menggunakan pikirannya untuk menggali kebenaran yang lebih tinggi.

Ada beberapa kondisi penyebab yang memaksa pengembangan ilmu pengetahuan harus dilakukan secara dinamis, kalau tidak akan sangat berdampak kurang baik pada setiap institusi, wilayah ataupun negara. Adapun kondisi yang dimaksud adalah :

1. Dinamika tuntutan masyarakat-masyarakat yang luar biasa dan sangat kompleks yang melahirkan diferensiasi sosial, baik berdasarkan *gender*, peran sosial, profesi, pendidikan, dan ekonomi.
2. Tekanan kompetisi dan konfigurasi global ASEAN, China, India, Eropa, USA, atau antar lembaga internasional. Antar negara yang biasa kita kenal dengan istilah globalisasi yang sudah menonjol sejak 1980an. Archer mengatakan globalisasi sebagai : *a growing world wide interconnectedness of structure and agency*. Inter-koneksi ini melibatkan berbagai hal, mulai dari *power*, kepentingan, konflik yang melintasi batas-batas administrasi negara.
3. Disrupsi Teknologi Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 yang menuntut iptek yang lebih super canggih. Era *disruption* ini setuju tidak setuju telah menghancurkan cara bisnis konvensional, penetrasi internet dalam kehidupan sehari-hari dengan potensi mempermudah kehidupan sehari-hari manusia melalui otomasi, menghilangkan pekerjaan konvensional dengan mesin robot hingga pada kehidupan 5.0 yang harus mengurus utamakan manusia sebagai manusia dalam kehidupan era revolusi industri 4.0.
4. Pandemic Covid19 yang sangat berdampak pada kesehatan dan pelayanannya, ekonomi, transportasi publik, pelayanan publik, dan hubungan sosial yang terbatas.

Dunia sedang mengalami perubahan yang sangat cepat, kehadiran teknologi tanpa kita sadari telah memasuki sendi-sendi kehidupan manusia, dan harus diakui bahwa teknologi sangat memberi kemudahan bagi kehidupan manusia, dalam pelayanan maupun kehidupannya. Namun, dampaknya tidaklah sebatas yang kita dapat rasakan. Banyak dampak yang timbul, selain yang positif juga dampak negatifnya yang bahkan sampai mendegradasi harkat martabat manusia itu

sendiri. Tidak dapat dipungkiri banyak yang memperoleh sukses dalam hal bisnis, pengetahuan, dan pendidikan, manajemen dan sebagainya oleh karena kehadiran teknologi ini. Akan tetapi, kita harus membuka mata dengan lebar-lebar juga terhadap tingkat kesulitan, ketimpangan, ketidakadilan yang terjadi bagi sebagian masyarakat dikarenakan perkembangan dan kemajuan teknologi, terutama oleh teknologi ITC dalam kehidupan manusia pada saat Revolusi Industri 4.0 saat ini. Contohnya dengan peringkat 6 terbesar didunia, Indonesia sebagai pengguna perangkat seluler yang terhubung dengan jaringan yaitu dari 2.375.563.363 juta penduduk Indonesia, 236.800.000 diantaranya menggunakan perangkat seluler (99.68%) tahun 2013. Akan tetapi apabila kita perhatikan dari capaian Index Pembangunan Indonesia dari berbagai indikator, dengan kehadiran teknologi tersebut, Indonesia masih tertinggal. Untuk lebih kongkrit dapat dilihat berbagai indeks pada tabel berikut ini:

Negara	Global Competitiveness Index (GCI) 2017-2019		Ease of Doing Business (EoDB) 2017-2018		Corruption Perceptions Index (2017)		Governance Effectiveness Index (2019)	
	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
Singapore	1	5.71	2	85.24	6	84	1	100
Korea Selatan	28	5.07	5	84.14	51	54	41	80.77
Malaysia	22	5.17	15	80.60	62	47	51	75.76
Thailand	25	4.72	27	78.45	96	37	71	66.35
Indonesia	32	4.68	73	67.96	96	37	95	54.71
Vietnam	55	4.36	69	68.36	107	35	99	52.88
Philippines	46	4.35	124	57.68	111	34	101	51.92

Sumber: World Bank, Global Governance Index, Transparency International 2016-2019

Tabel ini menunjukkan baik dalam hal *Competitiveness Index* 2017-2019, *ease of doing business* 2017-2018, *Corruption Perception Index* 2017 dan *Government Effectiveness Index* (2019) masih berada pada peringkat 6 dari 8 negara ASEAN

Gambaran ini sekaligus dapat menunjukkan pada kita, bahwa pasti ada banyak potensi yang belum dapat digali dan diaktualisasikan dengan baik karena ketertinggalan atau kelemahan kita dalam memanfaatkan IPTEK, serta manajemen, terutama dalam hal kelemahan pengembangan sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan pada hal IPTEK sebenarnya hadir untuk memberi kemudahan. IPTEK atau ITC sebenarnya dapat memudahkan dalam pengembangan berbagai strategi pendekatan kolaborasi, apakah dengan model *triple helix*, *quadruple helix*, *penta helix*, dan seterusnya yang dapat mensinergikan berbagai helix, mulai Akademisi, Bisnis, Government, Civil society, Mas media dll. Dengan pemanfaatan IPTEK yang canggih secara profesional dalam upaya kolaborasi dapat menghasilkan berbagai terobosan baru atau inovasi untuk memecahkan berbagai masalah publik, serta mengejar ketertinggalan demi kemajuan suatu Negara Bangsa.

Dari pengalaman masa pandemic Covid19 selain dampak negative, terdapat juga sisi positifnya dalam kehidupan. Dari sisi positif ini misalnya, telah memaksa kita harus memanfaatkan teknologi ITC terhadap berbagai kegiatan pelayanan publik dan berhasil memaksa kita. Tidak seperti pada saat sebelumnya dalam menghadapi revolusi industri masa 4.0, barang kali kita masih hanya sekedar berwacana meningkatkan penggunaan teknologi, tapi dengan pandemic Covid19 ini telah menjadi *action*, dan kita telah menikmati efisiensi dan efektivitas kinerja sekaligus menghindari perkembangan penularan Covid19 tersebut (Calvin, 2020; Rulandari, 2020; Tawai et al., 2021; Yuliana, 2020) Dalam hal ini, kita banyak melakukan kegiatan dengan internet, misal menggunakan *zoom* dan media sosial, seperti proses belajar menggunakan *zoom*, WFH, konsultasi kesehatan *online*, dll. Sebagai pengalaman nyata dan sukses dapat menjadi semangat dan motivasi dapat dijadikan contoh dan tantangan bagi kita, Permasalahannya adalah; Bagaimana pengalaman baik tersebut dapat ditransplantasikan atau dielaborasi pada strategi pengembangan keilmuan, dan kualitas pendidikan untuk mencapai 8 indikator kinerja utama secara akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemikiran Pemecahan Masalah: Pengembangan Strategi Kolaboratif Dengan Paradigma Agile Governance Dalam Pengembangan Keilmuan Dan Kualitas Pendidikan Untuk Mencapai 8 Indikator Kinerja Utama

Salah satu terobosan baru kebijakan Menteri Pendidikan untuk meningkatkan peran dan kualitas Pendidikan tinggi pada pembangunan nasional adalah penetapan 8 (delapan) indikator kinerja utama. Setiap PTN akan mendapat insentif kinerja apabila mampu mencapai dan mengembangkan 8 (delapan) indikator kinerja utama (IKU) tersebut. Adapun 8 (delapan) IKU tersebut adalah:

1. Lulusan mendapat pekerjaan yang layak,
2. Mahasiswa mendapat pengalaman diluar kampus,
3. Dosen berkegiatan diluar kampus,
4. Praktisi mengajar didalam kampus,
5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat,
6. Program Studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia,
7. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan
8. Program Studi berstandar internasional.

Kalau kita telusuri dan pahami 8 (delapan) IKU ini, sebenarnya berhubungan dengan konsep pendekatan kolaborasi seperti yang telah diuraikan diatas. Dalam hal ini menyangkut manajemen universitas, yang bertujuan untuk mencapai agar lulusan mendapat pekerjaan yang layak dan cepat. Dalam konsep administrasi dan manajemen pendekatan kolaborasi ini, dapat dikatakan sebagai pendekatan yang mentransformasikan pendekatan *in ward looking* menuju *out ward looking* atau dari pendekatan yang hanya mengutak atik kedalam birokrasi seperti konsep yang dikembangkan Weber, yang kaku dengan pendekatan aturan-peraturan secara struktural, membenahi lebih kepada persoalan internal organisasi, mulai daripada tata kelola MSDM, keuangan, peralatan-perengkapan dirancang secara rational untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas. Pendekatan ini sebenarnya sudah harus ditinggal dalam sektor administrasi public menuju kombinasi *out ward looking*. Karena keberhasilan suatu tata kelola organisasi manajemen tidak diukur hanya sekedar, bagaimana proses manajemen dibuat sedemikian rupa rapinya, berazas pada perhitungan-perhitungan efisiensi dan efektivitas yang akan dipertanggung jawabkan. Akan tetapi lebih dan utamanya adalah apakah publik atau target grup yang dilayani memperoleh dengan baik barang dan jasa yang sesuai dengan harapannya dan memuaskan. Jadi tidak seberapa banyak aturan yang dibuat dan tidak bisa dilanggar, serta bagaimana SOP, efisiensi yang harus dikejar, dan lain-lain.

Dalam hal ini salah satu bidang studi Ilmu Sosial yang relative sangat cepat harus beradaptasi dengan perkembangannya adalah Ilmu Administrasi Publik. Disiplin ilmu ini, memang berada pada posisi garda terdepan untuk menangkap dan merespons tuntutan perkembangan saat ini dan yang akan datang. Perkembangan yang harus dapat merealisasikan pelayanan publik yang lebih baik, terutama dalam menghadapi tantangan masa Era Industri 4.0 dan 5.0, dengan masa tekanan pandemic Covid19, serta konfigurasi relasi dunia internasional yang memiliki karakter "VUCA": *Volatility*; perubahan yang sangat cepat, *Uncertainty*; masa depan yang tidak pasti, *Complexity*; banyak faktor yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, *Ambiguity*; ketidak jelasan pengaruh satu peristiwa terhadap peristiwa lain. Dengan keadaan demikian, Ilmu Administrasi Publik dituntut untuk mengembangkan konsep teori dan bahkan strategi praktisnya, apalagi disiplin ilmu ini adalah sosok ilmu *applied sciences* atau ilmu terapan (Simmons & Dvorin, 1977; Stokey & Zeckhauser, 1978). Dengan kata lain agar disiplin ilmu ini seperti yang diharapkan dapat mempertahankan *scientific validity* dan *policy relevancenya*, maka disiplin ilmu ini harus *move on* dari paradigma dan sifat-sifat lama menuju pendekatan *agile governance dalam arti lebih tangkas, gesit dan lincah* (Fontana et al., 2014; J.H.de O.Luna et al., 2014; A. Luna et al., 2010; A. J. H. de O. Luna, 2015; A. J. H. de O. Luna et al., 2015; Poligadu & Moloo, 2014; Soundararajan et al., 2020). Oleh karena itu, paradigma Weberian; Osborne dan Gaebler; David Osborne dan Peter Plastrik, ini harus ditinggal menuju pendekatan *forward focused organization* dengan asumsi dasarnya adalah perubahan-perubahan mendasar yang sering kali "VUCA" sehingga menuntut pemimpin yang visioner, sosok yang dapat menggerakkan dan

menumbuhkan partisipasi dalam dengan agile governance yang mampu melihat dan mengolah perubahan menjadi kesempatan. Inilah tuntutan yang harus menjadi pusat perhatian penting dalam pengembangan teori dan praktik Administrasi Publik dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan ke depan (Caiden, 2019).

### Strategi Pemecahan Masalah

Tulisan ini, bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran pada pokok bahasan "Bagaimana pengembangan keilmuan dan kualitas Pendidikan dalam mencapai 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU)". Dari kajian teoritis yang telah dilakukan, khususnya dari perspektif disiplin ilmu sosial Ilmu Administrasi Publik, dalam hal ini lebih bersifat sebagai disiplin ilmu *applied science* sekaligus untuk memberikan sumbangan konsep praktik dan menjaga supaya tidak mengalami mati suri atau keusangan tidak bermanfaat, maka disiplin ilmu ini harus mengejar dan mengembangkan konsep teori dan praktiknya, mempertahankan tingkat *scientific validity* dan *policy revelancenya*.

Dengan tuntutan VUCA pada saat ini Administrasi Publik harus mampu beradaptasi dengan cepat. Sehubungan dengan hal ini administrasi publik telah memperkenalkan konsep "*agile governance*" yang dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah. Konsep ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam menghadapi berbagai perubahan dan sifat perubahan yang terjadi. Keunggulan dari konsep *agile* ini melakukan simplikasi terhadap birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan, unik, berpikir *out of the box*, serta perwujudan dari *dynamic governance*.

Pada era digital 4.0 menuju 5.0 saat ini, birokrasi publik harus disadari akan ditinggalkan kalau malah membuat rumit dengan kemudahan teknologi. Oleh karena itu, berpikir ulang untuk memahami makna sebenarnya birokrasi sangat penting dilakukan. Sederhananya birokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, birokrasi itu harus mampu menjadi alat untuk memfasilitasi dan memberi kemudahan-kemudahan yang nyata dalam proses pencapaian tujuan. Alat yang baik adalah alat yang praktis dan relevan terhadap berbagai tantangan yang dihadapi termasuk menghadapi VUCA sekalipun. Hubungannya dengan pengembangan keilmuan dan kualitas Pendidikan dalam mencapai 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU), maka *agile governance*, dalam hal ini birokrasi Pendidikan di USU haahl mampu memfasilitasi proses manajemen, mulai dari tingkat biro, lembaga, sampai pada fakultas dan departemen. Pimpinan mampu menghidupkan dan mengarahkan setiap potensi yang ada, untuk mengelola berbagai peluang dan bahkan tantangan secara partisipatif dengan konsep *agile governance*, dengan mengembangkan berbagai pendekatan kerjasama apakah dengan *triple helix* akademis, *business government*, atau *quadruple helix* dengan mengikutkan masyarakat atau *penta helix*, dan seterusnya.

### Rencana Tindak Lanjut

#### 1. One Agency One Innovation

Merupakan konsep alternatif yang mewajibkan setiap program studi S1, S2, S3 harus mampu menghasilkan suatu inovasi dalam setiap tahun. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan dasar kerjasama yang berkelanjutan antara, program studi tertentu dengan lembaga lain yang memiliki keilmuan serta hubungan saling menguntungkan, diantara dua belah pihak secara kelembagaan, contoh sederhana seperti Program Studi Pertanian dengan Dinas Pertanian atau Peternakan yang ada di pemerintahan. Program Studi Parawisata dengan Dinas Parawisata, Program Studi Ilmu Administrasi Publik dengan Pemprov dan Kabupaten Kota, dan Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis dengan perusahaan-perusahaan tertentu secara bilateral berkelanjutan. Dengan kerjasama ini dapat menggali sesuatu terobosan baru yang menguntungkan dua belah pihak. Dari program studi dapat mengikut sertakan mahasiswa-mahasiswa yang akan mengembangkan kompetensinya sesuai dengan core bisnis kerja sama yang dikembangkan.

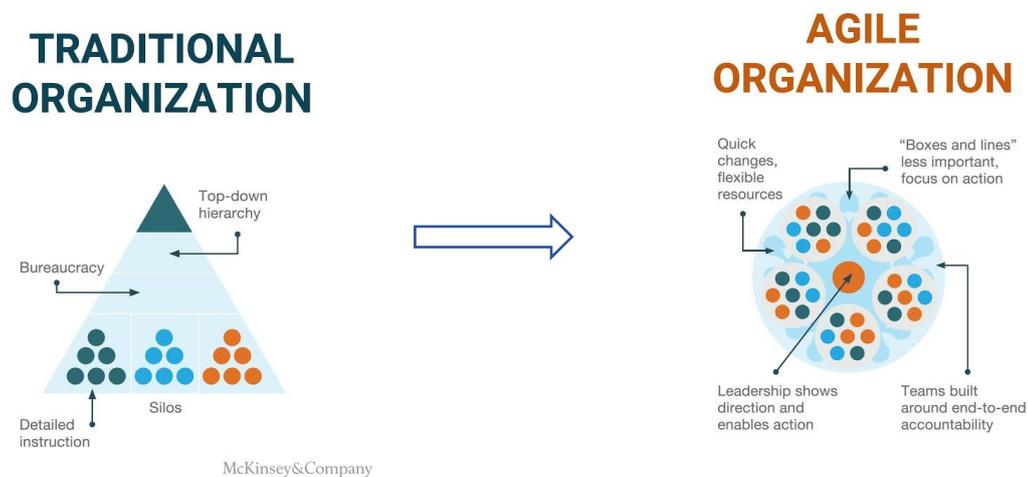
Hasil temuan baru dapat diimplementasikan oleh perusahaan atau dinas partner/kerjasama. Barangkali pendekatan ini dapat dilakukan dengan model kerja sama *double helix* atau *triple helix*

dengan melibatkan lembaga lain, seperti bisnis untuk menghasilkan output yang spesifik. Dari pihak program studi dapat mengembangkan pendekatan ini pada lembaga pemerintah atau swasta lain yang sejenis atau berbeda. Dengan demikian akan membuka peluang partisipasi mahasiswa dan dosen lebih besar. Konsep kolaborasi ini menuntut kesiapan program studi sebagai inisiator untuk mampu merancang konsep kegiatan yang menarik dan dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh kedua belah pihak, melalui ikatan kerjasama yang kuat dan jelas.

## 2. Sekolah Desa

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui Program Nawa Cita Pembangunan, pada urutan ketiga menempatkan; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan; secara akademis pembangunan desa ini, dapat dilihat sebagai lahan kajian yang cukup luas dan kompleks, untuk dijadikan lokus dan fokus program belajar. Sebagai objek kajian, desa merupakan tempat, pemasok, dan pengguna hasil IPTEK yang sampai pada saat ini masih tertinggal membutuhkan sentuhan. Oleh sebab itu, kehadiran perguruan tinggi pasti luar biasa dapat berperan memotivasi perubahan pada desa-desa yang dapat dijangkau, dengan model kerja sama yang baik. Desa sebagai tempat belajar, memiliki kompleksitas permasalahan, mulai dari masalah pertanian, peternakan, pariwisata, pemerintah, kerukunan umat beragama, teknologi tepat guna, dll. Dalam hal ini pendekatan kolaborasi dapat dirancang apakah dengan triple helix, quadruple helix, bahkan penta helix atau hexa helix. Dengan pendekatan agile governance dalam arti suatu kolaborasi dapat melibatkan lebih dari dua unsur, seperti dua atau tiga departemen program studi, fakultas yang sama/berbeda, melibatkan bisnis atau lembaga lain dalam menguatkan program kolaborasi.

Sentuhan tata Kelola agile governance dalam hal ini dengan cara menata struktur kerja sama yang lebih fleksibel, cepat, dan terukur. Menghilangkan pendekatan struktur dengan devisi-devisi yang terlalu mekanistik dan kaku, dari pola lama tradisional ke pola yang agile seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Dengan cara ini konsep Kampus Merdeka Belajar juga, akan dapat diaplikasikan dengan demikian akan memberi manfaat besar kepada setiap *stakeholder* yang terlibat dalam Kerjasama yang akan dibangun.

## 3. Program Mengajar di Masyarakat

Program ini tak kalah pentingnya dengan cara mendorong mahasiswa dapat mengajarkan ilmu pengetahuan, khusus pada bidang kompetensinya kepada masyarakat dan atau anak sekolah. Dengan persiapan yang baik, melalui bimbingan dosen pengasuh, hal ini akan dapat menjadi pengalaman besar bagi mahasiswa yang bersangkutan, menambah kepercayaan diri, demikian bagi masyarakat atau murid sekolah yang memperoleh *sharing* ilmu pengetahuan tersebut, menjadi motivasi yang dapat dilanjutkan dengan praktek masyarakat atau membuat pameran inovasi, *business gathering*, dan lain-lain.

## SIMPULAN

Dari tiga model dengan dasar konsep yang disajikan, dapat menjawab strategi pengembangan keilmuan dan kualitas pendidikan dalam mendorong tercapainya IKU. Dengan alasan, praktek pengembangan ilmu dengan pendekatan ini diharapkan, lebih orientasi dan berubah dari pendekatan *laboratorium* tertutup menjadi *to be out of the box*, pasti lebih berdaya guna. Pendekatan ini juga sangat kolaboratif partisipatif dengan strategi *double helix* atau *triple helix* hingga *penta helix* yang dapat melibatkan orang ikut berpartisipasi lebih besar, terutama daripada mahasiswa dalam pengembangan kompetensinya, dari satu program studi atau berbagai program studi dari fakultas yang sama atau berbeda, melalui suatu model kolaborasi belajar yang dibangun. Demikian sumbangsih perguruan tinggi kepada masyarakat akan sangat signifikan, sehingga perguruan tinggi dalam mengembangkan tridarma perguruan tingginya tidak seperti “menara gading” lagi pada lingkungannya. Karena perguruan tinggi USU dengan helix atau *stakeholder yang lain* dapat bersinergi satu dengan lain dengan baik. Demikianlah sekaligus, tiga point penting dalam tulisan ini dapat tercapai, yaitu: Strategi Pengembangan Keilmuan dan Kualitas Pendidikan dan Mendorong Tercapainya 8 (delapan) Indikator Kinerja Umum (IKU).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arbesman, S. (2012). Truth decay: the half-life of facts. *New Scientist*, 215(2883), 36–39.
- Caiden, G. E. (2019). Administrative reform. *Handbook of Comparative and Development Public Administration*, 655–668.
- Calvin. (2020). Handling Covid-19 Related To Regional Security According To Asean Political-Security Community. *Lex Scientia Law Review*, 4(1), 19–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38195>
- Fontana, R. M., Reinehr, S., & Malucelli, A. (2014). Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming. In *Lecture Notes in Business Information Processing* (Vol. 179). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-06862-6>
- Heri, R., Nasution, M. A., & Isnaini, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Dana Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 190–203.
- J.H.de O.Luna, A., Kruchten, P., E.Pedrosa, M. L. G. do, Almeida Neto, H. R. d., & Moura, H. P. d. M. (2014). State of the Art of Agile Governance: A Systematic Review. *International Journal of Computer Science and Information Technology*, 6(5), 121–141. <https://doi.org/10.5121/ijcsit.2014.6510>
- Kesmawan, A. P., Pramusinto, A., Kusumasari, B., & Susilastuti, D. H. (2020). Driving Indonesia’s Public Service Innovation Through Leadership Model. *Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019)*, 259–278.
- Kumorotomo, W. (n.d.). *IN SEARCH OF PAY-FOR-PERFORMANCE SYSTEM IN CIVIL SERVICES: A CHALLENGE OF ADMINISTRATIVE REFORM IN INDONESIA*.
- Luna, A., Costa, C., Moura, H., Novaes, M., & Nascimento, C. (2010). Agile Governance in Information and Communication Technologies: Shifting Paradigms. *JISTEM Journal of Information Systems and Technology Management*, 7(2), 311–334. <https://doi.org/10.4301/s1807-17752010000200004>
- Luna, A. J. H. de O. (2015). *Agile Governance Theory*. 601. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15494>
- Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P., & de Moura, H. P. (2015). *Agile Governance Theory: conceptual development*. 1–22. <http://arxiv.org/abs/1505.06701>
- Poligadu, A., & Moloo, R. K. (2014). An innovative measurement programme for agile governance. *International Journal of Agile Systems and Management*, 7(1), 26–60. <https://doi.org/10.1504/IJASM.2014.059153>
- Rulandari, N. (2020). The Impact of the Covid-19 Pandemic on the World of Education in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 1(4), 242–250. <https://doi.org/10.52728/ijss.v1i4.174>
- Rytel, M. W., & Jones, T. C. (1966). Induction of interferon in mice infected with *Toxoplasma gondii*. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine*, 123(3), 859–862.
- Simmons, R. H., & Dvorin, E. P. (1977). *Public administration: Values, policy, and change. (No Title)*.
- Stokey, E., & Zeckhauser, R. (1978). *A primer for policy analysis. (No Title)*.
- Tawai, A., Suharyanto, A., Putranto, T. D., De Guzman, B. M. N., & Prastowo, A. A. (2021). Indonesian covid-19 issue on media: review on spiral of silence application theory. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 5(2), 286–301. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i2.3758>
- Tjokrowinoto, M. (1996). *Pembangunan: Dilema dan tantangan*. Pustaka Pelajar.
- Utama, J. (2014). *Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Sang Media.

Yuliana. (2020). Corona virus diseases (Covid -19); Sebuah tinjauan literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 187–192. <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/v1i218wh>

